



Research Article

## Peran DPRD Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Publik

Wahyu Wiji Utomo<sup>1</sup>, Rahmat Affandi<sup>2</sup>, Najwa El-Khoir Hasibuan<sup>3</sup>, Nafisa Agda Maghrusyah<sup>4</sup>, Rizki Fadilah Nasution<sup>5</sup>, Batara Harahap<sup>6</sup>, Roni Rahmat Ritonga<sup>7</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail; [wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id](mailto:wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id) 

Copyright © 2026 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 13, 2026  
Accepted : April 15, 2026

Revised : March 19, 2026  
Available online : May 18, 2026

**How to Cite:** Wahyu Wiji Utomo, Rahmat Affandi, Najwa El-Khoir Hasibuan, Nafisa Agda Maghrusyah, Rizki Fadilah Nasution, Batara Harahap, & Roni Rahmat Ritonga. (2026). The Role of the North Sumatra DPRD in Improving Community Welfare Through Public Policy. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 3(1), 35-43. <https://doi.org/10.61166/policy.v3i1.30>

### The Role of the North Sumatra DPRD in Improving Community Welfare Through Public Policy

**Abstract.** This study aims to analyze the strategic role of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra in improving community welfare through public policies. The DPRD's legislative, budgeting, and supervisory functions contribute to the creation of policies that support social and economic development. This research employs a qualitative approach with a descriptive analysis method, utilizing primary data from interviews with policymakers and secondary data from relevant official documents. The findings reveal that the DPRD actively formulates inclusive public policies, such as budget allocations for education, healthcare, and infrastructure sectors. However,

challenges such as limited institutional capacity and political influences may hinder policy effectiveness. Therefore, enhancing the quality of DPRD human resources, ensuring transparency, and increasing public participation in the legislative process are necessary to achieve more targeted policies. This research is expected to serve as a reference to strengthen the DPRD's role in developing public policies oriented towards community welfare.

**Keywords:** DPRD, North Sumatra, public policy, community welfare, development.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik. DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang berkontribusi pada penciptaan kebijakan yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, berdasarkan data primer berupa wawancara dengan pemangku kebijakan dan data sekunder dari dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD berperan aktif dalam menetapkan kebijakan publik yang inklusif, seperti alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengaruh politik yang dapat menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia DPRD, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses legislasi untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat peran DPRD dalam menciptakan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** DPRD, Sumatera Utara, kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat, pembangunan.

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik memiliki peran krusial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, karena merupakan instrumen negara untuk mengalokasikan sumber daya dan menciptakan regulasi yang adil dan inklusif. Menurut World Bank, kebijakan publik yang baik mampu mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan, kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dapat memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data yang relevan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat (Mitchell & Font, 2017). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk merumuskan kebijakan publik yang efektif demi tercapainya kesejahteraan bersama.

DPRD Sumatera Utara berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berorientasi pada kebutuhan daerah. Dalam fungsi legislasi, DPRD menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Fungsi anggaran diwujudkan dengan menyusun dan mengesahkan APBD yang memprioritaskan alokasi untuk program-program pro-rakyat. Selain itu, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Contohnya, DPRD Sumut turut mengawasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan kesehatan melalui

berbagai inisiatif berbasis data yang mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut (Anam & Anwar, 2020).

Menggal kontribusi DPRD Sumatera Utara dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik mengungkapkan peran strategis lembaga ini dalam tata kelola daerah. Dalam fungsi perumusan, DPRD Sumut berperan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum kebijakan, seperti regulasi perlindungan tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pada tahap pelaksanaan, DPRD memastikan program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, terlaksana sesuai dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan dalam pengawasan, DPRD menjalankan monitoring melalui audit kinerja dan evaluasi anggaran untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut laporan BPS Sumut, implementasi kebijakan pro-rakyat yang dikawal DPRD telah berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan, mencerminkan efektivitas kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebijakan publik merupakan upaya sistematis untuk mengatasi masalah publik melalui analisis kebijakan yang berbasis bukti. Secara konseptual, kebijakan publik melibatkan proses kompleks, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Di Indonesia, kebijakan publik dirancang dengan pendekatan berbasis perencanaan pembangunan jangka panjang dan pendek, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Yunitasari et al., 2023).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah, yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi kebijakan publik di tingkat lokal. Dalam fungsi anggaran, DPRD berwenang membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan (Marwan & Julianthy, 2019). Fungsi pengawasan dijalankan dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program oleh pemerintah daerah, untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga fungsi ini menegaskan bahwa DPRD berperan sebagai representasi masyarakat dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan secara demokratis, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan melalui teori pembangunan dan kesejahteraan yang menekankan peran kebijakan dalam menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik. Menurut teori pembangunan oleh Todaro kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengatasi masalah struktural, seperti kemiskinan, pengangguran, dan

ketimpangan, melalui intervensi yang terencana (Suryono, 2010). Di Indonesia, kebijakan publik seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bagaimana intervensi kebijakan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, sebagaimana tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan yang dilaporkan oleh BPS sebesar 9,36% pada 2023. Dengan demikian, kebijakan publik yang dirancang secara komprehensif memiliki korelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menggali secara mendalam peran DPRD Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman langsung dari berbagai pihak yang terlibat, seperti anggota DPRD, pemerintah daerah, serta masyarakat yang menjadi penerima dampak kebijakan. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik oleh DPRD, sementara analisis dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kontribusi DPRD dalam menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan dokumen kebijakan DPRD Sumatera Utara yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur mencakup berbagai referensi dari jurnal, buku, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang membahas peran DPRD dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan publik, khususnya yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh DPRD Sumut, seperti Peraturan Daerah (Perda), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan laporan pelaksanaan kebijakan daerah, akan dianalisis untuk memahami langkah-langkah konkret yang diambil dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data melalui kedua sumber ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran DPRD Sumut dalam mendukung pembangunan daerah melalui kebijakan publik yang efektif.

### **PEMBAHASAN**

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berbasis kebutuhan lokal. Perda sektor pendidikan, misalnya, bertujuan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, seperti Perda tentang Wajib Belajar 12 Tahun atau subsidi pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu (Suwardi, 2012). Kebijakan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Di Sumatera Utara, Perda yang mendukung program literasi

dan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi bukti konkret komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, Perda di sektor kesehatan dan infrastruktur juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perda tentang pelayanan kesehatan gratis atau program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) memastikan bahwa masyarakat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai (Prakasa & Suparyati, 2022). Di sektor infrastruktur, Perda tentang pembangunan jalan desa atau fasilitas sanitasi berkontribusi pada peningkatan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Dengan adanya regulasi yang relevan dan implementasi yang tepat, Perda berfungsi sebagai landasan hukum yang kokoh dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DPRD berperan strategis dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan fokus pada program prioritas pro-rakyat, guna memastikan alokasi anggaran mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 104 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kewenangan membahas dan menyetujui APBD bersama kepala daerah, dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contohnya, alokasi minimal 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003, telah mendukung pembangunan sekolah dan peningkatan kualitas guru di berbagai daerah. Di sektor kesehatan, anggaran dialokasikan untuk program layanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang terbukti meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Melalui fungsi anggaran ini, DPRD memastikan bahwa program-program yang dibiayai APBD tidak hanya efektif, tetapi juga berorientasi pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan program daerah merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah efektif dalam mencapai tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan data BPS, program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial dan pemberdayaan UMKM di Sumatera Utara telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan hingga 9,36% pada tahun 2023. DPRD melakukan evaluasi melalui rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), monitoring lapangan, dan audit laporan anggaran guna memastikan program tersebut tepat sasaran dan sesuai alokasi APBD. Dalam pemberdayaan ekonomi, misalnya, evaluasi DPRD terhadap program kredit usaha mikro telah meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil. Begitu pula dalam pelayanan publik, pengawasan DPRD memastikan perbaikan kualitas layanan kesehatan dan administrasi pemerintah. Dengan evaluasi yang komprehensif, DPRD dapat memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan implementasi program daerah di masa mendatang.

Salah satu kebijakan DPRD Sumatera Utara yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa dana desa digunakan

secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Utara, implementasi kebijakan ini telah meningkatkan akses masyarakat terhadap jalan desa yang layak, fasilitas sanitasi, dan irigasi pertanian. Selain itu, DPRD juga mendukung kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, sehingga berkontribusi pada peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan kebijakan ini, DPRD Sumut menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa alokasi anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

DPRD Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam mitigasi persoalan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam legislasi, DPRD berkontribusi menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam fungsi anggaran, DPRD memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, peningkatan layanan pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan data BPS 2023, kebijakan DPRD Sumut dalam mendukung program pengentasan kemiskinan berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,36%. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, DPRD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang merata, terutama di kawasan pedesaan dan daerah terpencil, guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi tantangan serius dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan efektif. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (2022), rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya akses informasi, keterbatasan forum konsultasi publik, dan rendahnya literasi politik masyarakat. Di Sumatera Utara, misalnya, survei menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat yang merasa dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan daerah, terutama di tingkat desa dan kecamatan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dirumuskan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan transparansi, optimalisasi teknologi informasi dalam penyebaran informasi kebijakan, dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik dan sosialisasi kebijakan publik. Dengan partisipasi yang lebih luas, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.

Hambatan birokrasi dan alokasi anggaran yang tidak merata menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yang efektif, terutama di daerah seperti Sumatera Utara. Menurut laporan BPK 2023, kompleksitas birokrasi sering kali menyebabkan keterlambatan implementasi program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, memperparah ketimpangan pembangunan. Data dari Bappeda Sumut menunjukkan bahwa

sebagian besar alokasi anggaran masih terkonsentrasi di perkotaan, dengan sekitar 60% APBD dialokasikan untuk kawasan metropolitan, sementara daerah terpencil mendapatkan porsi yang jauh lebih kecil. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi birokrasi yang berfokus pada efisiensi dan transparansi, serta kebijakan redistribusi anggaran yang lebih adil guna memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.

Tantangan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan publik menjadi isu kritis dalam memastikan keberhasilan program pembangunan daerah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dalam lembaga pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh laporan KPK 2023, yang mencatat bahwa hanya 40% dari pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, memiliki mekanisme pengawasan internal yang memadai. Selain itu, lemahnya koordinasi antara DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat sering menyebabkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan. Data BPK menunjukkan adanya potensi penyimpangan anggaran akibat pengawasan yang tidak optimal, terutama pada proyek infrastruktur dan layanan publik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti e-monitoring, serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme pengawasan partisipatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas DPRD Sumatera Utara dalam merancang kebijakan pro-rakyat harus melibatkan penguatan kapasitas legislasi, transparansi, dan partisipasi public (Hussein & Darmawan, 2023). Pertama, DPRD perlu mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang inklusif untuk memastikan kebijakan yang dirancang mencerminkan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Data dari BPS Sumut menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kebutuhan lokal, seperti pemberdayaan UMKM, memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Kedua, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, seperti e-legislation dan platform daring, dapat mempercepat proses penyusunan kebijakan sekaligus meningkatkan transparansi. Ketiga, kolaborasi dengan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) diperlukan untuk menyediakan data empiris sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan menerapkan strategi ini, DPRD Sumut dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik yang pro-rakyat serta berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berdampak luas. DPRD berperan sebagai penghubung yang strategis dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, sementara masyarakat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam konsultasi publik dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Studi dari Kemendagri (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contohnya, program pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara menjadi lebih tepat sasaran dengan melibatkan forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh DPRD. Selain itu, penggunaan

teknologi seperti e-government dapat memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait, meningkatkan transparansi, dan memastikan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap kebijakan. Dengan kolaborasi yang sinergis, pemerintahan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat terwujud.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data BPK 2023, ditemukan adanya beberapa daerah yang masih menghadapi masalah dalam pengelolaan anggaran, seperti ketidaksesuaian alokasi dengan prioritas pembangunan yang mendesak. Di Sumatera Utara, misalnya, meskipun ada peningkatan dalam penggunaan e-budgeting, masih terdapat potensi penyalahgunaan anggaran pada proyek-proyek infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, transparansi dalam penganggaran melalui publikasi dokumen anggaran yang mudah diakses dan pemantauan anggaran secara berkala menjadi langkah krusial untuk meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, pengawasan independen oleh DPRD dan lembaga-lembaga lain, seperti BPK, harus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan bahwa alokasi anggaran memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Azifi & Marliyah, 2022).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Sumatera Utara memegang peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang pro-rakyat. Berdasarkan data yang ada, seperti kebijakan pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta Peraturan Daerah (Perda) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, DPRD berhasil mendukung program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam hal transparansi anggaran dan pengawasan yang efektif, upaya DPRD dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Secara keseluruhan, peran DPRD Sumut sebagai lembaga legislatif yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah terbukti penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## SARAN

Implikasi kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD Sumatera Utara menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, berdasarkan data yang ada, masih terdapat tantangan terkait dengan pengawasan yang kurang efektif dan alokasi anggaran yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, saran untuk perbaikan di masa mendatang mencakup peningkatan transparansi anggaran melalui sistem e-budgeting yang lebih inklusif, serta penguatan kapasitas pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses evaluasi

kebijakan. Selain itu, perlu ada penyesuaian alokasi anggaran yang lebih adil untuk memastikan pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan oleh DPRD Sumut dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., & Anwar, K. (2020). *Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik*. 10. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index>
- Azifi, M. R., & Marliyah. (2022). *Peran Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kota Medan*. 11.
- Arina Nur Azizah, Nanik Sutarni, & Adhiputro Pangarso Wicaksono. (2025). Analysis Of Women's Representation In Carrying Out Legislative Functions As Members Of The Boyolali Regency Regional House Of Representatives. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 171–196. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.31>
- Hussein, A., & Darmawan, D. (2023). Perancangan Sistem Pelaporan Kegiatan Perjalanan Dinas Anggota Dprd Sumatera Utara Menggunakan Metode Prototype Dwiky Darmawan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Juritek Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 3(3). <https://doi.org/10.51903/juritek.v3i2.2399>
- Lailatul Berliana, Siti Nurhalizah, Nasya Amelia Putri, & Mashudi. (2025). Indonesian Political System Post Reformation. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 143–151. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i3.81>
- Marwan, A., & Julianthy, E. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 15.
- Mitchell, J., & Font, X. (2017). Evidence-Based Policy In Ethiopia: A Diagnosis Of Failure. *Development Southern Africa*, 34(1), 121–136. <https://doi.org/10.1080/0376835x.2016.1231056>
- Prakasa, G. S., & Suparyati, A. (2022). Dampak Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Jawa. *Media Ekonomi*, 30(1), 16–29. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.10133>
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Universitasbrawijayapress.
- Suardi. (2012). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). In *Public Administration Journal 319 Jap* (Vol. 3, Issue 2).
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. A., & Nyoman, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Definisi, Aktor Pelaksana, Konteks, Jenis, Dan Langkah Kebijakan)*.